



PARADOKS KEBEBASAN DAN KEKACAUAN DI TWITTER: SEBUAH KAJIAN FILSAFAT TEKNOLOGI

Ida Ayu Putu Praba Saskarani¹, Anggy Paramitha Sari²

¹Universitas Hindu Negeri I Gusti Bagus Sugriwa Denpasar

Abstract

This article examines the phenomenon of freedom of speech on Twitter as part of the transformation of the digital public sphere through the lens of philosophy of technology. Social media, particularly Twitter, has become an open space that enables broad public participation, while simultaneously presenting challenges such as the spread of hoaxes, hate speech, and emotional conflicts. This study uses a descriptive qualitative method with a reflective-analytical approach based on the thoughts of Jürgen Habermas, Jacques Ellul, and Martin Heidegger. The analysis reveals that Twitter, rather than serving as a rational forum for discourse, often functions as an attention economy driven by algorithms, virality, and technical impressions. The dominance of technical logic over ethical and humanistic values creates a paradox between freedom and chaos, ultimately weakening the foundation of digital democracy. Therefore, fostering critical awareness and ethical literacy in social media use is essential to ensure a healthy, rational, and inclusive digital public space.

Keywords

Twitter, digital public sphere, freedom of expression, philosophy of technology, Habermas

PENDAHULUAN

Dalam era digital yang terus berkembang, media sosial telah menjadi ruang publik virtual yang penting bagi interaksi sosial, pertukaran informasi, dan ekspresi kreatif (Ridlo et al., 2024). Perkembangan pesat media sosial dalam dua dekade terakhir telah mengubah secara fundamental cara manusia berinteraksi, berkomunikasi, dan membangun ruang publik. Media sosial

kini menjadi ruang terbuka di mana setiap individu memiliki kesempatan yang sama untuk menyebarkan informasi, beradu argumentasi, serta berpartisipasi dalam diskursus publik tanpa batasan geografis maupun sosial. Menurut Salman (2021), media sosial sebagai turunan dari internet telah menghadirkan ranah baru yang inklusif, memungkinkan siapa saja untuk terlibat secara bebas dalam perbincangan publik

¹ dayuprabasaskaranii@gmail.com

² anggytha17@gmail.com

tanpa intervensi negara atau otoritas tertentu. Fenomena ini dikenal sebagai *new public sphere*, di mana interaksi virtual menciptakan dinamika baru dalam advokasi, pembentukan opini, dan penyebaran nilai-nilai sosial. Dalam konteks filsafat teknologi, Jürgen Habermas menekankan pentingnya ruang publik (*public sphere*) sebagai arena diskursif di mana individu dapat berdiskusi secara rasional dan inklusif tanpa intervensi negara atau kepentingan ekonomi. Habermas berpendapat bahwa idealnya, ruang publik harus menjadi tempat diskusi yang egaliter dan rasional, namun di era digital, transformasi ruang publik ini menghadapi tantangan serius akibat dominasi algoritma dan fragmentasi diskusi. Meskipun demikian, sebagian besar penelitian sebelumnya lebih banyak menyoroti aspek kebebasan berbicara dari perspektif hukum, komunikasi, dan politik, sehingga kajian yang menempatkan persoalan ini dalam perspektif filsafat teknologi masih relatif terbatas. Hal inilah yang menunjukkan adanya celah penelitian (*research gap*) yang perlu dikaji lebih lanjut.

Twitter menjadi contoh nyata media sosial yang mendukung kebebasan berbicara dan menjadi “balai kota digital” modern di mana setiap orang bebas mengekspresikan pandangannya terhadap berbagai isu, mulai dari politik, budaya, hingga kehidupan sehari-hari (Musk, sebagaimana dikutip dalam *The Conversation*, 2023). Platform ini memungkinkan penggunaannya untuk mengekspresikan pendapat secara cepat dan terbuka, sehingga memperkuat praktik demokrasi digital (Sari, 2022).

Namun, seperti yang diungkapkan oleh Habermas diskusi di ruang publik digital sering kali kehilangan dimensi rasionalitas dan solidaritas sosial karena banyak pengguna terjebak dalam arus komentar yang tidak mempertimbangkan realitas secara matang. Selain itu, Jacques Ellul menyoroti bahwa dalam masyarakat teknologis, teknologi berkembang menjadi sistem otonom yang mendikte cara hidup manusia, termasuk dalam hal interaksi digital.

Masalah utama dari kebebasan berbicara di Twitter adalah munculnya konflik, perpecahan, penyebaran berita palsu (*hoaks*), dan kebingungan dalam berpikir. Kebebasan yang tidak diimbangi dengan etika dan tanggung jawab membuat batas antara pendapat yang membangun dan yang merusak menjadi kabur (Kumparan, 2024). Banyak kasus dimana kebebasan ini dimanfaatkan untuk menyebarkan ujaran kebencian, *hoaks*, pencemaran nama baik, dan bahkan pelecehan daring. Fenomena ini menimbulkan konflik antarindividu maupun kelompok, serta menciptakan kekacauan berpikir di tengah masyarakat digital. Kebebasan yang tidak disertai dengan pemahaman etika dan tanggung jawab telah mengaburkan batas antara ekspresi yang konstruktif dan destruktif, sehingga berpotensi mengancam tatanan sosial dan moralitas bersama. Dalam beberapa kasus, absolutisme kebebasan berbicara di Twitter bahkan dapat mengancam hak asasi manusia lainnya, seperti hak atas rasa aman dan perlindungan dari diskriminasi

Habermas sendiri mengkritik bahwa dominasi algoritma dalam media

sosial telah menggeser ruang publik dari diskusi rasional menjadi arena yang didominasi oleh sensasi dan konflik emosional, sehingga mengurangi peluang dialog lintas perspektif dan memperlemah fondasi demokrasi. Sementara itu, Ellul menegaskan bahwa masyarakat teknis cenderung mendorong homogenisasi pemikiran dan mengurangi relevansi nilai-nilai humanis, karena segala sesuatu diukur berdasarkan nilai teknis seperti efisiensi dan produktivitas, bukan lagi keadilan atau moralitas.

Menjadi penting untuk menelaah fenomena kebebasan berbicara di Twitter melalui kacamata filsafat teknologi. Pendekatan filsafat memungkinkan kita untuk memahami secara lebih mendalam implikasi eksistensial, etis, dan epistemologis dari penggunaan media sosial sebagai ruang publik. Berdasarkan latar belakang tersebut, rumusan masalah dalam penelitian ini adalah: (1) bagaimana fenomena kebebasan berbicara di Twitter dapat dipahami dalam perspektif filsafat teknologi, dan (2) bagaimana struktur teknologi media sosial mempengaruhi diskursus publik di ruang digital. Sejalan dengan itu, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis fenomena kebebasan berbicara di Twitter dalam perspektif filsafat teknologi serta mengkaji bagaimana struktur teknologi media sosial membentuk dinamika diskursus publik. Adapun kontribusi penelitian ini diharapkan dapat memperkaya kajian filsafat teknologi, khususnya terkait relasi antara manusia, teknologi, dan kebebasan berekspresi di era digital, serta memberikan pemahaman kritis bagi masyarakat

dalam menggunakan media sosial secara lebih bijak dan reflektif.

METODE

Metode penelitian yang digunakan dalam artikel ini adalah kualitatif deskriptif. Metode ini dipilih karena bertujuan untuk memahami fenomena kebebasan berbicara di Twitter secara mendalam dan holistik, dengan menekankan makna dan konteks sosial yang melingkupinya. Penelitian kualitatif deskriptif berlandaskan pada paradigma postpositivisme yang memandang realitas sosial sebagai sesuatu yang kompleks, dinamis, dan penuh makna, sehingga hasilnya lebih menekankan pemahaman daripada generalisasi statistik. Dalam pendekatan ini, peneliti berperan sebagai instrumen utama yang mengumpulkan dan menganalisis data secara induktif, sehingga memungkinkan penafsiran yang kaya terhadap fenomena yang diteliti.

Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah studi pustaka atau kajian literatur. Studi pustaka dilakukan dengan mengumpulkan dan menelaah literatur terkait filsafat teknologi, media sosial, dan ruang publik, khususnya karya-karya tokoh seperti Jürgen Habermas dan Jacques Ellul. Teknik ini memungkinkan peneliti untuk menggali teori dan konsep yang relevan sebagai landasan analisis fenomena kebebasan berbicara di Twitter, tanpa melakukan pengumpulan data lapangan secara langsung. Kajian literatur ini meliputi buku, artikel ilmiah, jurnal, dan sumber digital yang kredibel serta terkini.

Pendekatan yang digunakan adalah reflektif-analitis, yakni

menganalisis fenomena secara kritis dan mendalam berdasarkan pemikiran tokoh filsafat teknologi seperti Habermas dan Ellul. Pendekatan ini menekankan refleksi filosofis terhadap implikasi sosial, etis, dan epistemologis dari penggunaan media sosial sebagai ruang publik modern. Dengan cara ini, penelitian tidak hanya mendeskripsikan fenomena, tetapi juga mengkaji makna dan konsekuensi yang lebih luas dari kebebasan berbicara di Twitter dalam konteks teknologi dan masyarakat kontemporer. Pendekatan reflektif-analitis ini sesuai dengan karakteristik penelitian kualitatif yang menitikberatkan pada proses pemahaman dan interpretasi data secara mendalam.

PEMBAHASAN

Twitter Sebagai Ruang Publik Digital

Twitter memiliki karakteristik unik sebagai media sosial yang cepat, terbuka, dan singkat, dengan batasan maksimal 280 karakter pada setiap pesan. Karakter ini memungkinkan komunikasi yang ringkas dan instan, sehingga memudahkan penyebaran informasi secara luas dalam waktu yang sangat singkat. Secara ideal, Twitter berfungsi sebagai ruang dialog dan diskusi publik yang memungkinkan partisipasi aktif masyarakat dalam menyampaikan pendapat, kritik, dan saran terkait berbagai isu publik. Dalam konteks demokrasi digital, Twitter berpotensi menjadi media kontrol sosial yang efektif, di mana masyarakat dapat mengawasi dan memberikan masukan langsung kepada pihak-pihak berwenang. Hal ini juga didukung oleh temuan dalam studi komunikasi digital

yang menunjukkan bahwa media sosial meningkatkan partisipasi politik warga dan memperluas akses terhadap ruang publik (Loader & Mercea, 2011). Sebagai contoh konkret, akun Twitter resmi seperti @PemkotBPN telah dimanfaatkan sebagai sarana komunikasi dua arah antara pemerintah dan masyarakat untuk membahas isu-isu publik serta mengelola keluhan warga secara langsung. Selain itu, berbagai kasus viral yang diangkat melalui Twitter seperti keluhan pelayanan publik yang kemudian direspons cepat oleh instansi terkait menunjukkan bahwa visibilitas digital dapat mendorong akuntabilitas secara lebih efektif. Inisiatif ini mendukung prinsip transparansi dan good governance, sebagaimana dikemukakan oleh Kurniawati (2018), yang menegaskan pentingnya keterbukaan dan akuntabilitas dalam tata kelola pemerintahan modern.

Namun demikian, idealisme tersebut tidak selalu tercermin dalam praktik di lapangan. Twitter juga menjadi ruang yang rawan berkembangnya ujaran kebencian, penyebaran hoaks, serta polarisasi opini yang tajam. Penelitian empiris dalam komunikasi digital menunjukkan bahwa algoritma media sosial cenderung memprioritaskan konten yang memicu emosi tinggi karena lebih mampu menghasilkan keterlibatan pengguna (Vosoughi, Roy, & Aral, 2018). Akibatnya, konten yang bersifat kontroversial atau provokatif lebih mudah menjadi viral dibandingkan informasi yang faktual dan berimbang. Realitasnya, platform ini sering kali berubah menjadi arena konflik digital yang memperburuk fragmentasi sosial dan mempercepat

penyebaran informasi yang tidak akurat atau menyesatkan. Fenomena trending topic yang dipenuhi perdebatan emosional atau penyebaran informasi yang belum terverifikasi menjadi contoh konkret bagaimana dinamika algoritmik membentuk arah diskursus publik. Kondisi ini memicu kekacauan berpikir di ruang publik digital, di mana diskursus yang seharusnya konstruktif malah terdistorsi oleh emosi negatif dan ketegangan antar kelompok. Dengan demikian, meskipun Twitter memiliki potensi besar sebagai media demokrasi digital dan kontrol sosial, tantangan besar berupa penyalahgunaan platform untuk menyebarkan konten berbahaya dan memecah belah masyarakat harus menjadi perhatian serius bagi semua pemangku kepentingan.

Perspektif Filsafat Teknologi

Guna memahami dinamika ruang publik digital seperti Twitter, perspektif filsafat teknologi menyediakan kerangka kritis untuk menganalisis bagaimana teknologi memengaruhi cara manusia berpikir, berkomunikasi, dan berinteraksi. Salah satu pemikir utama dalam diskursus ruang publik adalah Jürgen Habermas, yang mengemukakan bahwa ruang publik ideal merupakan arena diskursus rasional di mana individu dapat berpartisipasi secara setara dan bebas dari dominasi. Dalam ruang tersebut, keputusan bersama dibentuk melalui argumentasi logis dan keterbukaan terhadap pandangan berbeda. Habermas membayangkan masyarakat di mana diskursus publik tidak dikendalikan oleh kekuasaan ekonomi

maupun politik, melainkan oleh kekuatan argumen rasional.

Namun, realitas Twitter sebagai ruang publik digital sering kali jauh dari idealisme tersebut. Platform ini lebih sering menjadi arus komunikasi cepat yang didorong oleh emosi, popularitas, dan algoritma, sehingga diskursus rasional yang konstruktif sulit terwujud. Menurut Salisanaml (2021), diskursus di Twitter cenderung dipenuhi simbolisme kelompok, konvergensi opini semu, serta kecenderungan membentuk identitas digital yang berorientasi pada eksistensi, bukan substansi.

Selain itu, Jacques Ellul, filsuf teknologi asal Prancis, menyoroti teknologi sebagai kekuatan otonom dan deterministik yang berkembang berdasarkan logika efisiensi teknis tanpa mempertimbangkan dampak etis atau moralnya. Dalam konteks media sosial seperti Twitter, hal ini tercermin pada cara algoritma menyorot konten yang paling banyak disukai, dibagikan, atau dikomentari tanpa memperhatikan akurasi, makna, atau etika. Akibatnya, perhatian pengguna dipertarungkan dalam sistem yang lebih menghargai sensasionalisme dan kecepatan daripada kedalaman dan kualitas pemikiran. ITTC Journal (2024) menyatakan bahwa hal ini mendorong budaya berpikir instan dan dangkal, di mana pengguna didorong merespons isu secara cepat dan emosional tanpa refleksi atau verifikasi informasi terlebih dahulu. Dalam kerangka Ellul, Twitter dapat dipandang sebagai teknologi sosial yang kehilangan dimensi etikanya karena fokus utama sistem adalah keterlibatan (engagement), bukan pertukaran gagasan rasional.

Konsekuensi dari pandangan Habermas dan Ellul terhadap fenomena Twitter mengarahkan kita pada kesadaran bahwa ruang publik digital saat ini lebih menyerupai pasar perhatian daripada forum deliberatif. Setiap individu berlomba menciptakan daya tarik visual dan verbal untuk mendapatkan perhatian sebanyak-banyaknya, sering kali tanpa mempertimbangkan kebenaran atau etika konten yang dibagikan. UNIBI ArtComm Journal (2023) menjelaskan bahwa konten viral di Twitter cenderung menggunakan gaya provokatif, meme satiris, atau potongan informasi yang dipelintir agar lebih menarik. Hal ini menunjukkan bahwa Twitter bukan hanya mencerminkan kebebasan berbicara, tetapi juga bagaimana teknologi secara tidak sadar membentuk pola pikir dan perilaku sosial. Jika ruang publik ideal menurut Habermas dibentuk oleh rasionalitas dan kepentingan bersama, maka ruang publik digital seperti Twitter justru dibentuk oleh algoritma dan kalkulasi impresi. Oleh karena itu, memahami Twitter tidak cukup hanya sebagai media komunikasi, melainkan juga sebagai representasi bagaimana teknologi membentuk realitas sosial dan kualitas demokrasi kontemporer.

Kebebasan vs Kekacauan: Twitter dalam Kacamata Filsafat Teknologi

Dari perspektif filsafat teknologi, kebebasan berekspresi di Twitter menghadirkan paradoks mendalam antara kemajuan teknologi dan kemunduran kualitas diskursus publik. Di satu sisi, teknologi digital membuka ruang ekspresi individu yang lebih luas dan merata. Namun, sebagaimana

dikemukakan oleh Jacques Ellul, perkembangan teknologi tidak bersifat netral. Ia tumbuh secara otonom berdasarkan prinsip efisiensi teknis, bukan atas dasar nilai moral atau kemanusiaan. Dalam konteks Twitter, algoritma dirancang untuk memaksimalkan keterlibatan (engagement), bukan untuk memfasilitasi diskusi yang sehat dan rasional. Akibatnya, yang diprioritaskan bukan argumen kuat atau ide konstruktif melainkan konten sensasional yang memancing emosi. Fenomena ini memperkuat budaya komunikasi reaktif yang mempercepat munculnya kekacauan sosial.

Twitter hari ini bukan lagi ruang diskursus deliberatif seperti yang dibayangkan Jürgen Habermas, melainkan medan tempur narasi yang sarat konflik simbolik. Habermas menegaskan bahwa ruang publik ideal adalah arena diskusi rasional yang bebas dari dominasi kekuasaan dan tekanan emosional. Namun, realitas di Twitter justru menunjukkan sebaliknya: suara paling keras dan konten yang paling cepat viral lebih dominan daripada suara yang bernalar dan argumentatif. Misalnya, dalam polemik RUU Penyiaran terbaru, reaksi publik lebih didasarkan pada potongan informasi yang tersebar liar dan memicu kemarahan, bukan pada kajian hukum atau konteks substantif. Hal ini mengindikasikan bahwa ruang publik digital telah bergeser menjadi arena emosional yang jauh dari rasionalitas komunikatif.

Menurut Martin Heidegger, teknologi modern mengubah cara manusia memaknai dunia; kita tidak lagi berdialog dengan kenyataan, melainkan

menaklukkannya melalui representasi teknis. Twitter menjadi contoh nyata bagaimana komunikasi direduksi menjadi representasi data dan impresi seperti like, retweet, dan trending topic. Nilai dan makna tersingkir oleh kecepatan dan kuantitas interaksi. Akibatnya, kebebasan yang seharusnya membuka ruang pemahaman bersama justru berujung pada fragmentasi dan disorientasi kolektif. Masyarakat tidak lagi berdiskusi untuk memahami, melainkan untuk membenarkan posisi masing-masing.

Jika kebebasan berekspresi tidak disertai kesadaran kritis terhadap bagaimana teknologi membentuk cara berpikir dan berkomunikasi, maka yang muncul bukanlah ruang publik demokratis, melainkan simulasi kebebasan yang memenjarakan manusia dalam bias, kebisingan, dan konflik tanpa arah. Twitter, dalam bentuknya saat ini, menjadi contoh bagaimana teknologi yang seharusnya menyatukan justru memperparah keterpecahan akibat hilangnya dimensi etik dan reflektif. Oleh karena itu, filsafat teknologi mengingatkan kita bahwa pertanyaan mendasar bukan hanya tentang apa yang dapat kita katakan di ruang digital, melainkan bagaimana struktur teknologi itu sendiri memengaruhi cara kita berkata, berpikir, dan memahami dunia.

Lebih jauh, filsafat teknologi mengingatkan bahwa teknologi bukanlah entitas netral yang berdiri sendiri, melainkan bagian integral dari praktik sosial dan politik. Oleh karena itu, transformasi Twitter dari ruang diskusi deliberatif menjadi medan tempur narasi simbolik harus dipahami

sebagai refleksi dari dinamika kekuasaan dan kepentingan yang terinternalisasi dalam desain teknologi itu sendiri. Upaya memperbaiki kualitas diskursus publik di era digital harus melibatkan pendekatan interdisipliner yang menggabungkan filsafat, etika, teknologi, dan kebijakan publik untuk menciptakan ekosistem komunikasi yang sehat dan demokratis.

Dengan demikian, tantangan utama bukan hanya pada kebebasan berekspresi itu sendiri, tetapi pada bagaimana struktur teknologi membingkai dan membatasi kebebasan tersebut. Twitter dan platform digital sejenis harus direkonstruksi sebagai ruang publik yang mendukung deliberasi rasional dan inklusif, bukan sekadar arena pertarungan narasi yang memperkuat polarisasi dan konflik sosial. Ini adalah panggilan bagi semua pemangku kepentingan untuk merefleksikan kembali peran teknologi dalam kehidupan demokrasi dan membangun masa depan digital yang lebih manusiawi dan bermartabat.

SIMPULAN

Twitter sebagai ruang publik digital menawarkan peluang besar bagi demokratisasi informasi dan partisipasi masyarakat, namun sekaligus menghadirkan tantangan serius berupa polarisasi, penyebaran hoaks, dan distorsi diskursus publik. Karakteristiknya yang cepat, terbuka, dan berbasis interaksi menjadikan platform ini efektif sebagai sarana kontrol sosial, tetapi juga rentan terhadap penyalahgunaan. Dari perspektif filsafat teknologi, temuan penelitian ini menunjukkan bahwa

kebebasan berbicara di Twitter tidak bersifat netral, melainkan dibentuk oleh struktur algoritmik yang memprioritaskan keterlibatan emosional dibanding rasionalitas. Akibatnya, ruang publik digital cenderung bergeser dari model deliberatif menuju arena yang reaktif dan terfragmentasi. Kebaruan penelitian ini terletak pada penegasan bahwa relasi antara manusia dan teknologi dalam media sosial bersifat konstruktif, di mana teknologi turut membentuk pola pikir, komunikasi, dan kualitas diskursus publik. Oleh karena itu, penguatan literasi digital, kesadaran etis, serta pengelolaan platform yang lebih bertanggung jawab menjadi kunci untuk menjaga agar kebebasan berekspresi tetap selaras dengan nilai rasionalitas, etika, dan kemanusiaan.

DAFTAR PUSTAKA

- Habermas, J. (1987). *The structural transformation of the public sphere: An inquiry into a category of bourgeois society*. Cambridge: Polity Press.
- ITTC Journal. (2024). Ruang publik baru melalui desain di media sosial. *ITTC Journal*, 2(1), 34–41.
- Kaltimnews. (2025). Etika komunikasi pada media sosial Twitter sebagai ruang publik. *Kaltimnews*, 3(2), 55–60.
- Kompasiana. (2024, Agustus 20). Jacques Ellul: Masyarakat teknologis. Kompasiana.
- Kompasiana. (2025, Januari 13). Ketika algoritma mengatur diskusi publik: Kritik terhadap public sphere era digital. Kompasiana.
- Kumparan. (2024, Oktober 29). Kebebasan dan tanggung jawab dalam filsafat komunikasi media sosial. Kumparan.
- Kurniawati, N. A. (2018). Ruang publik virtual Twitter pada akun @PemkotBPN sebagai alat kontrol publik. *Jurnal Ilmu Komunikasi FISIP UNMUL*, 5(1), 15–23.
- Loader, B. D., & Mercea, D. (2011). Social media and democracy: Innovations in participatory politics. *Information, Communication & Society*, 14(6), 757–769. <https://doi.org/10.1080/1369118X.2011.592648>
- Media Neliti. (2020). Twitter dan ruang publik pemerintahan lokal. *Media Neliti*, 4(3), 40–45.
- Research Kalbis. (2021). Media sosial sebagai ruang publik. *Kalbis Research Journal*, 4(3), 33–40.
- Ridlo, A. Z., Rievai, R. A., Yuningsih, S. R., Mahalani, E. R., & Nisa, P. K. (2024).
- Ruang publik baru melalui desain di media sosial. *Jurnal Ilmu Komunikasi dan Sosial Politik*, 1(4), 719–723.
- SalisanamI. (2021). Studi kasus Twitter menjadi ruang publik baru dengan teori konvergensi simbolik. *Kompasiana*, 15(2), 88–94.
- Sari, N. (2022). Analisis freedom of speech di media sosial Twitter dengan pendekatan kualitatif. *Al-I'lam: Jurnal Komunikasi dan Penyiaran Islam*, 6(1), 1–15.

- Ummat Journal. (2022). Analisis freedom of speech di media sosial Twitter dengan pendekatan kualitatif. *Ummat Journal*, 5(2), 77–85.
- Undiksha Journal. (2023). Etika komunikasi netizen Indonesia di media sosial sebagai ruang publik. *Jurnal Filsafat Indonesia*, 7(2), 112–120.
- Unesa. (n.d.). Metodologi penelitian kualitatif: Pengertian, jenis, contoh dan sistematikanya. FIP Unesa.
- UNIBI ArtComm Journal. (2023). Peranan akun Twitter @txtdaripemerintah sebagai ruang publik. *UNIBI ArtComm Journal*, 6(1), 98–105.
- Vosoughi, S., Roy, D., & Aral, S. (2018). The spread of true and false news online. *Science*, 359(6380), 1146–1151.
<https://doi.org/10.1126/science.aap9559>